

Bersama Selamatkan KPK

SKENARIO pelemahan KPK melalui Pansus Hak Angket DPR terkait penanganan korupsi proyek E-KTP telah terbaca oleh publik. Para politikus partai di DPR yang tergabung dalam mayoritas fraksi setuju penggunaan Hak Angket, dan beberapa fraksi sepakat mengirimkan wakilnya dalam keanggotaan Pansus. Terakhir PAN dan Gerindra yang bermain pencitraan dengan seolah menolak pansus Hak angket bergabung, setelah terungkapnya nama Amien Rais sebagai salah satu penerima aliran dana korupsi alat kesehatan.

Pansus Hak Angket terhadap kinerja KPK dalam penanganan kasus korupsi E-KTP hanyalah "kuda Troya" bagi politikus DPR untuk memberangus kewenangan KPK. Muara akhir kegiatan pansus adalah rekomendasi pembahasan draft revisi UU KPK. Sejak 2012 DPR memang ngotot ingin merevisi UU KPK dengan tujuan membatasi kewenangan KPK dari mulai kewenangan penyadapan, penyidikan dan penuntutan.

DPR dan politikusnya gerah dengan sepak terjang KPK yang sering melakukan OTT (operasi tangkap tangan) terhadap praktik korupsi dan kolusi yang kerap melibatkan para politikus DPR. Sejumlah politikus DPR/DPRD yang terkena OTT KPK kini menghuni hotel prodeo untuk mempertanggungjawabkan tindakan nista mengkorupsi uang rakyat.

Modus pelemahan KPK dilakukan kalangan yang prokorupsi dan pendukung praktik korupsi. Dari mulai kampanye hitam tentang kinerja KPK yang tidak profesional, menciptakan wacana bahwa KPK tidak bersih dari korupsi, kriminalisasi komisioner KPK sampai upaya revisi UU KPK. Pimpinan DPR yang sangat anti-KPK sejak 2010 dan ingin membubarkan KPK adalah Fahri Hamzah yang wakil ketua DPR yang sesungguhnya telah dipecat dari keanggotaan PKS.

Masyarakat Sipil

Pansus Hak Angket terhadap KPK sendiri dipimpin oleh tokoh yang disebut-sebut terkait kasus korupsi proyek E-KTP. Yang sangat memprihatinkan fraksi-fraksi partai besar mendukung

Oleh **Trisno Yulianto**



Presiden harus berani menarik draft revisi UU KPK yang pada 2012 diajukan Menkumham Amir Syamsudin. Presiden Joko Widodo harus menepati janji kampanye yang akan memperkuat posisi dan eksistensi KPK.



penuh Pansus tersebut. Sepertinya tokoh pemimpin partai seperti Megawati, Prabowo, Amien Rais, dan beberapa nama lainnya setuju

pelaksanaan hak angket.

Langkah politik pasca Hak Angket adalah revisi UU KPK yang telah masuk dalam program legislasi Nasional (prolegnas) 2017. Dipastikan jika DPR jadi membahas draf revisi UU KPK maka yang terjadi adalah pemandulan KPK terhadap kewenangannya. Mayoritas Fraksi di DPR setuju dengan desain politikus pelemahan KPK. Tujuannya agar melindungi anggota DPR yang ingin berbuat korup untuk kepentingan pribadi/kelompok atau partai.

Untuk itulah KPK harus diselamatkan. Bola salju penyelamatan KPK ada di tangan Presiden Joko Widodo.

Presiden harus berani menarik draft revisi UU KPK yang pada 2012 diajukan Menkumham Amir Syamsudin. Presiden Joko Widodo harus menepati janji kampanye yang akan memperkuat posisi dan eksistensi KPK. Jika pemerintah (Presiden) menolak upaya revisi UU KPK maka proses legalisasi di DPR menjadi tidak *legitimated*.

Publik penggiat gerakan antikorupsi dan pendukung KPK harus mulai bergerak. Menggelorakan aksi mendukung KPK secara damai dan mampu menggalang dukungan penuh dari masyarakat sadar akan bahaya korupsi bagi bangsa dan negara.

Gerakan simbolis kultural bisa dilakukan dengan langkah riil di lapangan. Mendukung KPK harus menjadi agenda politik penguatan kesadaran masyarakat sipil. (21)

— **Trisno Yulianto**, Alumnus FISIP Undip, dan Koordinator Forum Kajian dan Transparansi Anggaran (Forkata)